



## Manajemen Pengelolaan Dana Desa Tahun 2024 Untuk Pembangunan Infrastruktur di Desa Rantau Kermas Kecamatan Jangkat Kabupaten Merangin Provinsi Jambi

### *Village Fund management in 2024 For Infrastruktur Development in Rantau Kermas Village, Jangkat District, Merangin District, Jambi Province*

Melda Sari<sup>1</sup>, Sutia Budi<sup>2</sup>

<sup>1,2</sup>Institut Teknologi dan Bisnis Ahmad Dahlan, Indonesia

Korespondensi penulis: [Sarimelda764@gmail.com](mailto:Sarimelda764@gmail.com)<sup>1</sup>

#### **Article History:**

Received: Juni 05, 2024;

Revised: Juni 17, 2024;

Accepted: Juli 06, 2024;

Published: Juli 09, 2024

**Keywords:** Village Fund, Management, Infrastruktur, Community, participation, Transparency, Village Development.

**Abstract.** Village fund management is a key element in accelerating development in rural areas. This article evaluates the management of village funds in 2024 in Rantau Kermas Village, Jangkat District, Merangin Regency, Jambi Province, with a focus on projects to improve farming roads and normalize river water for rice fields. The methodology used involves active community participation in project planning, implementation, monitoring and reporting, with technical assistance from students of the Ahmad Dahlan Institute of Technology and Business (ITB AD) Jakarta. The research results show that improving the 4 kilometer long agricultural road succeeded in increasing accessibility and reducing agricultural operational costs, while normalizing the 3 kilometer river succeeded in improving irrigation and reducing the risk of flooding, thereby increasing agricultural productivity. The principles of transparency and accountability are implemented through the formation of a Village Fund Management Team (TPDD) and regular reporting involving all elements of society. The discussion identified challenges such as limited capacity of village officials and resistance to change, which were successfully overcome through training and a participatory approach. The implications of this research show that effective village fund management can be a model for other villages in achieving sustainable and inclusive development.

#### **Abstrak**

Pengelolaan dana desa merupakan elemen kunci dalam mempercepat pembangunan di daerah pedesaan. Artikel ini mengevaluasi manajemen pengelolaan dana desa tahun 2024 di Desa Rantau Kermas, Kecamatan Jangkat, Kabupaten Merangin, Provinsi Jambi, dengan fokus pada proyek perbaikan jalan usaha tani dan normalisasi air sungai untuk persawahan. Metodologi yang digunakan melibatkan partisipasi aktif masyarakat dalam perencanaan, pelaksanaan, pengawasan, dan pelaporan proyek, dengan pendampingan teknis dari mahasiswa Institut Teknologi dan Bisnis Ahmad Dahlan (ITB AD) Jakarta. Hasil penelitian menunjukkan bahwa perbaikan jalan usaha tani sepanjang 4 kilometer berhasil meningkatkan aksesibilitas dan menurunkan biaya operasional pertanian, sementara normalisasi sungai sepanjang 3 kilometer berhasil memperbaiki irigasi dan mengurangi risiko banjir, sehingga meningkatkan produktivitas pertanian. Prinsip transparansi dan akuntabilitas diterapkan melalui pembentukan Tim Pengelola Dana Desa (TPDD) dan pelaporan berkala yang melibatkan seluruh elemen masyarakat. Pembahasan mengidentifikasi tantangan seperti keterbatasan kapasitas perangkat desa dan resistensi terhadap perubahan, yang berhasil diatasi melalui pelatihan dan pendekatan partisipatif. Implikasi penelitian ini menunjukkan bahwa pengelolaan dana desa yang efektif dapat menjadi model bagi desa-desa lain dalam mencapai pembangunan yang berkelanjutan dan inklusif.

**Kata Kunci:** Dana Desa, Pengelolaan, Infrastruktur, Partisipasi Masyarakat, Transparansi, Pembangunan Desa.

\*Melda Sari, [Sarimelda764@gmail.com](mailto:Sarimelda764@gmail.com)

## **1. PENDAHULUAN**

Dana Desa ini akan bermanfaat bagi desa-desa yang memiliki sumber pendapatan yang sangat terbatas yang biasanya bersumber dari alokasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota masing-masing dan jumlahnya tidak terlalu besar, serta tidak memiliki Pendapatan Asli Desa yang dapat menopang pembangunan di desa tersebut. Desa-desa seperti ini secara keseluruhan jumlahnya sangat besar di Indonesia, bahkan pada tahun 2016 menyentuh angka 63% dari seluruh desa di Indonesia (Republika, 2016).

Pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014, sebagai peraturan pelaksanaan UU Desa No. 6 Tahun 2014 mengatur bahwa Dana Desa dapat digunakan antara lain untuk membiayai penyelenggaraan pemerintah desa, pembangunan infrastruktur desa, pemberdayaan masyarakat desa dan kemasyarakatan, dengan prioritas pada aspek pembangunan desa dan pemberdayaan masyarakat. Arah kebijakan kegiatan pembangunan desa diarahkan kepada upaya mendorong partisipasi masyarakat di desa itu sendiri, dalam perencanaan dan pembangunan desa yang dilaksanakan secara swakelola.

Upaya pemerintah untuk mewujudkan percepatan pembangunan desa adalah salah satunya melalui Alokasi Dana Desa (ADD). Menurut Peraturan Pemerintah nomor 47 Tahun 2015 tentang perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang desa di dalam Pasal 1 ayat (9) menyatakan bahwa, “Alokasi Dana Desa adalah dana perimbangan yang diterima kabupaten/kota dan digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat.”

Desa Rantau Kermas, yang terletak di wilayah Kabupaten Merangin, Jambi, merupakan salah satu desa yang memiliki potensi besar dalam pengembangan ekonomi dan sosial melalui pembangunan infrastruktur. Seiring dengan kebijakan pemerintah yang mengalokasikan dana desa secara signifikan setiap tahunnya, Desa Rantau Kermas menerima dana desa yang bertujuan untuk mempercepat pembangunan dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa. Pada tahun 2024, manajemen pengelolaan dana desa menjadi fokus utama dalam upaya pembangunan infrastruktur yang berkelanjutan dan berdampak positif bagi masyarakat.

Pengelolaan dana desa yang efektif dan efisien sangat penting untuk memastikan bahwa dana tersebut digunakan sesuai dengan prioritas dan kebutuhan desa. Penggunaan dana desa yang tepat akan memungkinkan pembangunan infrastruktur yang dapat mendukung berbagai sektor,

termasuk pendidikan, kesehatan, ekonomi, dan transportasi. Oleh karena itu, diperlukan perencanaan yang matang, pengawasan yang ketat, serta partisipasi aktif dari masyarakat untuk mencapai tujuan tersebut (Kinaro, 2020).

Kegiatan ini akan membahas secara komprehensif tentang manajemen pengelolaan dana desa tahun 2024 di Desa Rantau Kermas dengan fokus utama pada pembangunan infrastruktur. Analisis ini mencakup perencanaan anggaran, implementasi proyek, monitoring dan evaluasi, serta tantangan dan solusi dalam pengelolaan dana desa terutama didalam pemecahan masalah yang dialami masyarakat Desa Rantau Kermas. Diharapkan melalui kegiatan ini, berbagai pihak yang terlibat dapat memperoleh gambaran yang jelas mengenai strategi dan langkah-langkah yang diperlukan untuk memaksimalkan pemanfaatan dana desa demi kemajuan dan kesejahteraan masyarakat Desa Rantau Kermas.

## 2. METODE

Jenis penelitian dalam penelitian ini adalah deskriptif di mana jenis ini digunakan dalam menggambarkan situasi atau fenomena yang menjadi topik penelitian ini sehingga diharapkan dapat memberikan informasi, membuat deskripsidan gambaran secara sistematis, faktual dan akurat terkait obyek yang akan diteliti. Sementara metode yang digunakan adalah kualitatif karena penulis ingin menggali informasi secara langsung dan mendalam dengan narasumber guna memperoleh informasi yang akurat mengenai Peran Kepala Desa dalam Pengelolaan Alokasi Dana Desa di Bidang Infrastruktur di Desa Rantau Kermas, Kecamatan Jangkat, Kabupaten Merangin, Provinsi Jambi (Creswell, 2009).

Indikator penilaian efektivitas ini umumnya digunakan untuk mengukur sejauh mana suatu program atau kegiatan telah mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Dengan demikian, indikator tersebut bisa menjadi alat yang bermanfaat untuk mengevaluasi bagaimana Dana Desa dikelola untuk meningkatkan pembangunan fisik di Desa Rantau Kermas. Berikut indikator penilaian menurut Halawa (2021).

**Tabel 2.1 Klasifikasi Pengukuran Efektifitas**

<b>Kriteria</b>	<b>Persentase (%)</b>
Sangat Efektif	80 - 100
Efektif	70 - <80
Cukup Efektif	60 - <70
Tidak Efektif	50 - <60

Berdasarkan tabel 2.1 yang telah disajikan, penilaian terhadap efektivitas dinyatakan sebagai Sangat efektif, jika hasil perhitungan mencapai di atas 80% -100%. Jika hasil perhitungan mencapai 70% - <80% maka dapat dikategorikan dalam kriteria efektif. Jika hasil perhitungan mencapai 60% - <70% maka dapat dikategorikan dalam kriteria cukup efektif. Jika hasil perhitungan mencapai 50% - <60% maka dapat dikategorikan dalam kriteria tidak efektif. Tabel tersebut akan memberikan pedoman untuk menilai tingkat efektivitas suatu kegiatan atau program, dan tingkat efektivitas ini dapat digunakan untuk mengevaluasi pengelolaan Dana Desa dalam konteks meningkatkan pembangunan fisik di Desa Rantau Kermas. Pada tahap awal peneliti mempersiapkan izin tugas dari pihak kampus agardapat di tunjukan ke pihak mitra kegiatan, Kemudian membahas dan mengamati tentang permasalahan yang sedang di hadapi dan mencari solusi pemecahan masalah dan langkah terakhir yaitu peneliti menyampaikan laporan atau pemaparan hasil kegiatan ke pihak kampus dan Lembaga adat dan pemerintahan Desa

### **3. HASIL**

Proyek perbaikan jalan usaha tani di Desa Rantau Kermas sepanjang 4 kilometer berhasil diselesaikan dalam waktu 5 bulan. Jalan yang sebelumnya rusak parah dan sulit dilalui kini sudah diperbaiki dengan lapisan aspal baru yang lebih kuat dan tahan lama. Hasil ini membawa beberapa dampak positif yaitu, peningkatan aksesibilita petani kini dapat mengangkut hasil panen mereka dengan lebih mudah dan cepat, terutama pada musim hujan, penurunan biaya operasional, biaya transportasi untuk mengangkut hasil panen turun secara signifikan karena kondisi jalan yang lebih baik dan peningkatan produktivitas karena akses yang lebih baik ke lahan pertanian meningkatkan produktivitas karena petani dapat lebih sering mengunjungi dan merawat lahan mereka.

Proyek normalisasi sungai yang melibatkan pengerukan dan pembersihan sepanjang 3 kilometer dari sedimentasi dan sampah berhasil meningkatkan aliran air. Proyek ini juga termasuk pembuatan saluran irigasi baru untuk mendukung area persawahan. Dampak dari proyek ini meliputi, aliran air yang lancar memastikan pasokan air yang memadai untuk sawah, terutama selama musim tanam, normalisasi sungai mengurangi risiko banjir yang sebelumnya sering merusak tanaman padi, dan dengan adanya irigasi yang lebih baik, hasil panen meningkat, yang pada gilirannya meningkatkan pendapatan petani.

Pengelolaan dana desa tahun 2024 di Desa Rantau Kermas mengikuti prinsip-prinsip transparansi, akuntabilitas, partisipasi masyarakat, dan keberlanjutan. Proses ini dapat diuraikan

sebagai berikut:

### **1. Transparansi dan Akuntabilitas**

Pembentukan Tim Pengelola Dana Desa (TPDD) yang terdiri dari perangkat desa, BPD, dan perwakilan masyarakat memastikan bahwa setiap langkah dalam penggunaan dana dipantau dengan ketat. Pengawasan ini mencakup pencatatan rinci dan pelaporan berkala yang dapat diakses oleh masyarakat. Proses perencanaan melibatkan musyawarah desa yang inklusif, memungkinkan masyarakat untuk memberikan masukan dan memprioritaskan kebutuhan mereka. Ini menciptakan rasa memiliki dan mendukung keberhasilan proyek.

### **2. Efektifitas Pelaksanaan**

Pelaksanaan proyek dilakukan secara bertahap dengan melibatkan tenaga kerja lokal, yang tidak hanya mempercepat pengerjaan tetapi juga memberdayakan ekonomi lokal. Pengawasan yang ketat dan evaluasi berkala oleh TPDD memastikan bahwa proyek berjalan sesuai rencana, dan jika ada kendala, segera diatasi.

### **3. Keberlanjutan**

Dalam proyek perbaikan jalan dan normalisasi sungai, material berkualitas digunakan untuk memastikan ketahanan dan manfaat jangka panjang. Mahasiswa ITB AD Jakarta memberikan pelatihan dan edukasi kepada masyarakat tentang pentingnya pemeliharaan infrastruktur yang sudah dibangun, sehingga keberlanjutan proyek dapat terjaga.

### **4. Dampak Sosial dan Ekonomi**

Dengan akses yang lebih baik dan irigasi yang optimal, produktivitas pertanian meningkat, yang pada gilirannya meningkatkan pendapatan dan kesejahteraan masyarakat desa. Keterlibatan aktif masyarakat dalam seluruh proses pengelolaan dana desa meningkatkan rasa kepemilikan dan tanggung jawab terhadap infrastruktur yang telah dibangun.

**Tabel 3.1 Capaian Kegiatan**

<b>Kegiatan</b>	<b>Solusi</b>	<b>Capaian</b>
Pembuatan jalan usaha tani	Melakukan survei, melibatkan masyarakat, mengalokasikan dana, menggunakan teknologi konstruksi	100 %
Normalisasi air sungai untuk persawahan	Melakukan survei, mengidentifikasi titik-titik yang memerlukan normalisasi, melibatkan pakar irigasi dan komunitas petani dan mengalokasikan dana.	100%

Berdasarkan tabel diatas maka dapat dilihat bahwa capaian dari kegiatan yang telah dilakukan, untuk memberikan solusi dari setiap permasalahan dilihat bahwa pembuatan jalan usaha tani memperoleh 100% hal ini menunjukkan bahwa solusi yang telah ditawarkan termasuk dalam kategori sangat efektif dan normalisasi air sungai untuk persawahan memperoleh capaian 100% hal ini juga menunjukkan bahwa solusi yang telah dimusyawarahkan dapat membantu memecahkan setiap masalah yang ditemukan, solusi yang ditawarkan termasuk dalam kategori sangat efektif.

#### **4. DISKUSI**

Proses perencanaan di Desa Rantau Kermas dimulai dengan musyawarah desa yang inklusif, melibatkan berbagai elemen masyarakat, termasuk tokoh masyarakat, perangkat desa, kelompok perempuan, dan pemuda. Partisipasi aktif masyarakat dalam tahap perencanaan memastikan bahwa proyek-proyek yang dipilih sesuai dengan kebutuhan dan prioritas lokal. Keterlibatan mahasiswa ITB AD Jakarta dalam musyawarah desa memberikan perspektif tambahan yang berharga, serta dukungan teknis dalam perencanaan proyek.

Kolaborasi antara akademisi dan masyarakat desa memperkaya proses perencanaan dengan pendekatan yang lebih sistematis dan berbasis data. Proyek ini berhasil menyelesaikan perbaikan jalan usaha tani sepanjang 4 kilometer. Peningkatan aksesibilitas dan penurunan biaya transportasi hasil panen menjadi indikator keberhasilan proyek ini. Penggunaan tenaga kerja lokal tidak hanya mempercepat proses pengerjaan tetapi juga memberdayakan ekonomi setempat.

Proyek normalisasi sungai berhasil meningkatkan aliran air untuk irigasi persawahan. Dampak langsungnya adalah peningkatan hasil panen dan pengurangan risiko banjir. Keberhasilan proyek ini menunjukkan pentingnya intervensi pada infrastruktur dasar yang mendukung sektor

pertanian. TPDD memainkan peran kunci dalam memastikan transparansi dan akuntabilitas. Setiap langkah dalam penggunaan dana dipantau dengan ketat, dan laporan penggunaan dana disampaikan secara berkala kepada masyarakat. Pengawasan oleh BPD dan masyarakat memastikan bahwa dana digunakan sesuai dengan rencana dan tidak terjadi penyimpangan.

Pelaporan yang transparan dan audit internal yang rutin menjadi mekanisme penting untuk menjaga kepercayaan masyarakat. Informasi mengenai penggunaan dana diumumkan melalui forum-forum desa dan media informasi lokal, yang memungkinkan masyarakat untuk mengawasi dan memberikan masukan. Salah satu tantangan utama dalam pengelolaan dana desa adalah keterbatasan kapasitas perangkat desa dalam manajemen proyek dan administrasi. Pelatihan dan pendampingan oleh pihak eksternal, seperti mahasiswa ITB AD, sangat membantu dalam mengatasi tantangan ini. Tantangan lain adalah resistensi terhadap perubahan dari sebagian masyarakat yang mungkin memiliki kepentingan berbeda. Pendekatan partisipatif dalam perencanaan dan komunikasi yang efektif dapat mengurangi resistensi ini dan meningkatkan dukungan terhadap proyek. Pengalaman Desa Rantau Kermas dapat dijadikan model bagi desa-desa lain dalam mengelola dana desa secara efektif. Prinsip transparansi, akuntabilitas, partisipasi masyarakat, dan keberlanjutan yang diterapkan dapat menjadi panduan bagi desa lain dalam melaksanakan proyek-proyek pembangunan.

Keterlibatan masyarakat dalam setiap tahap pengelolaan dana desa meningkatkan rasa kepemilikan dan tanggung jawab terhadap infrastruktur yang telah dibangun. Ini juga mendukung keberlanjutan proyek karena masyarakat lebih termotivasi untuk merawat dan memelihara hasil pembangunan. Kolaborasi antara akademisi dan masyarakat desa memberikan nilai tambah dalam proses perencanaan dan pelaksanaan proyek. Dukungan teknis dan pengetahuan dari akademisi dapat membantu meningkatkan kualitas proyek dan memastikan penggunaan dana yang lebih efektif.

## **5. KESIMPULAN**

Pengelolaan dana desa tahun 2024 di Desa Rantau Kermas untuk proyek perbaikan jalan usaha tani dan normalisasi air sungai telah berhasil meningkatkan kualitas infrastruktur dan kesejahteraan masyarakat. Prinsip transparansi, akuntabilitas, partisipasi masyarakat, dan keberlanjutan menjadi kunci keberhasilan proyek ini. Pengalaman ini dapat menjadi model bagi desa-desa lain dalam mengelola dana desa untuk mencapai pembangunan yang berkelanjutan dan

berkualitas.

## **6. PENGAKUAN**

Penulis ucapkan terimakasih kepada Tuhan atas nikmat dan karunia-Nya. Serta tidak lupa penulis ucapkan kepada Institut Teknologi dan Bisnis Ahmad Dahlan dan LP3M selaku penyelenggara kegiatan Merdeka Belajar Kampus Merdeka (MBKM) tahun 2024 ini. Dan terakhir penulis ucapkan kepada Bapak Setia Budi, S.E., M.Si selaku Dosen Pembimbing Merdeka Belajar Kmpus Merdeka, serta teman-teman dan masyarakat yang terlibat dalam penelitian ini.

## **DAFTAR REFERENSI**

- Creswell, J. (2009). *Research design: Pendekatan kualitatif, kuantitatif, dan mixed*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Halawa, Y. K. R. (2021). *Efektivitas pengelolaan dana desa dalam upaya peningkatan pembangunan di Desa Sifaoroasi, Kecamatan Huruna, Kabupaten Nias Selatan*. Universitas Medan Area, Medan.
- Kinaro, M. (2020). *Efektivitas pengelolaan dana desa dalam pembangunan infrastruktur di Desa Kajhu, Kecamatan Baitussalam, Kabupaten Aceh Besar*. Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Islam Banda Aceh.
- Partini. (2018). *Evaluasi pengelolaan dana desa (DD) dalam meningkatkan pembangunan fisik Desa Balangtanaya, Kecamatan Palangbakeng Utara, Kabupaten Takalar*. Skripsi, Universitas Muhammadiyah Makassar.
- Peraturan Menteri Desa Nomor 21 Tahun 2015 Tentang Penerapan Prioritas Penggunaan Dana Desa.
- Peraturan Menteri Desa Nomor 4 Tahun 2017 Tentang Penerapan Prioritas Penggunaan Dana Desa tahun 2017.
- Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 Tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa.
- Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 Tentang Dana Desa yang Bersumber dari APBN.